



KEWALAHAN: Petugas DLH Kota Jogja mengangkut sampah menggunakan armada truk di depo Kotabaru, Kota Jogja, kemarin (17/7). Depo Kotabaru digadang-gadang Pemkot Jogja sebagai depo bebas sampah plastik, namun hingga kini belum terwujud. Banyaknya sampah tidak sebanding dengan unit-unit pengelolaan sampah.

Pemkot Perlu Menggandeng Swasta

Saran DPRD Kota Jogja perihal Penanganan Tumpukan Sampah

JOGJA - Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro meminta pemkot segera mengambil langkah konkret dalam penanganan sampah. Sebab, beberapa titik di Kota Jogja kembali 'dihiasi' dengan tumpukan sampah.

"Masih banyak sampah yang tertahan di depo," Kritik Wisnu saat ditemui di kantornya, kemarin (17/7).

Fakta ini berbanding terbalik dengan komitmen pemkot. Menurutnya, pemkot pernah berkomitmen bahwa kiriman sampah dari peng-

gerak ke depo akan langsung diolah. Tumpukan sampah tidak akan tertahan di depo.

Di antara langkah konkret, politikus PDI Perjuangan ini menyarankan, pemkot bekerja sama dengan swasta. Keterlibatan swasta diperlukan lantaran unit-unit pengelolaan sampah milik pemkot kewalahan. Belum mampu menangani produksi sampah harian.

Wisnu enggan menyalahkan pemkot terkait lambannya penanganan sampah. Sebab, pemkot pun menghadapi berbagai kendala. Yang paling mencolok adalah keterbatasan anggaran.

"Untuk menambah insinerator

●● Untuk menambah insinerator juga tidak mungkin karena anggaran terbatas,"

WISNU SABDONO PUTRO
 Ketua DPRD Kota Jogja

juga tidak mungkin karena anggaran terbatas," ucapnya.

Terpisah, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo tak menampik pemkot kewalahan. Pemkot belum sanggup menangani 60 ton sampah per hari. Padahal, total produksi sampah harian di Kota Jogja mencapai 260 ton. Kondisi itu diperparah dengan pem-

batasan pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Ketika disinggung kerja sama dengan swasta, bekas bupati Kulon Progo ini menyebut banyak pengelola sampah pihak ketiga yang berhenti beroperasi. Itu menyusul regulasi yang mewajibkan standar keamanan terkait dampak lingkungan.

Karena itu, Hasto tengah merencanakan pemilahan di tingkat depo. Rencana itu akan dikemas dalam bentuk padat karya. Tujuannya agar bisa memberdayakan masyarakat.

"Kuncinya, memilah sambil mengedukasi masyarakat," katanya. (**inu/zam/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005